BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad 19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain Pabrik Gula dan Pabrik Teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV Nign yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk S'Lands Waterkarcht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTD Plegan, PLTA Barat, PLTU tarahan, Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di sumatra barat dan PLTU di Jakarta. Selain itu beberapa Kota Praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kota Praja.

Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia ke II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada taggal 17 Agustus 1945 maka kesempatan yang baik ini di manfaatkan oleh pemuda dan buruh Listrik da Gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari tangan kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945 delegasi dari buruh / pegawai listrik dan gas yang diketuai oleh Kobarsjah menghadap Pimpinan KNI Pusat yang pada

waktu itu diketuai oleh MR. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selama delegasi Kobarsjah bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan- perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah Tahun, 1945 No. 1 s/d tertanggal 27 Oktober 1945, maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri ke kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan Daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjah tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Parlemen Republik Indonesia. Selanjutnya dikeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :163, tanggal 3 Oktober 1953 tentang : Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkeraman penjajahan Belanda, maka dikeluarkan undang-undang Nomor : 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang : Nasionalisasi semua Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun

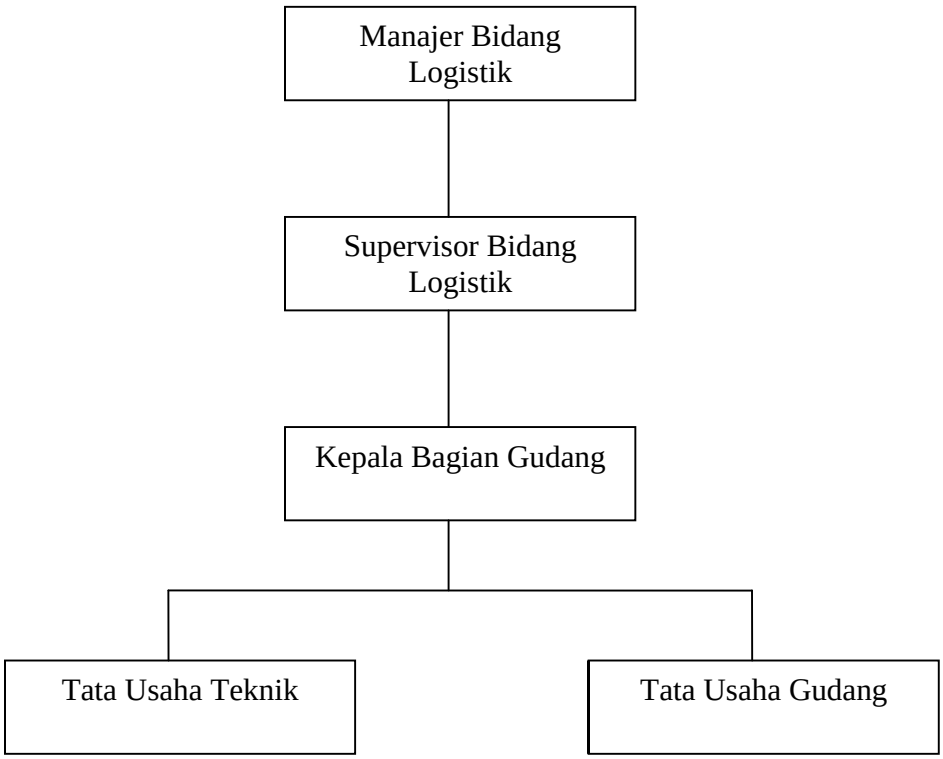
1958 tentang : Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda. Dengan undang-undang tersebut maka seluruh Perusahaan Listrik Belanda berada di tangan Bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komitye Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor : 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor : 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 Peringatan Hari Listrik dan Gas digabung dengan Hari Kebangkitan Pekerja Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai Hari Listrik maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

3.2. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi yang baik pada umumnya mempunyai struktur organisasi yang dapat membatasi pembagian-pembagian kerja pada masing-masing bagian. Struktur organisasi merupakan dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi perusahaan dan menetapkan hubungan yang pasti. Adapun struktur organisasi PT. PLN (Persero) PLTD metro,lampung tengah bisa dilihat dari gambar di bawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Bidang Logistik
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Sumatra bagian selatan
PLTD metro Lampung Tengah



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.3. Deskripsi Kerja

I. Manajer Bidang Logistik

Manajer bertanggung jawab atas pengelompokan usaha melalui optimalisasi seluruh bagian logistik secara efisien dan sinergis serta menjamin penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran barang.

II. Supervisor Bidang Logistik

Tugas pokoknya dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan logistik.

III. Kepala Bagian Gudang

Tugas pokoknya dalam melakukan pelaksanaan logistik, yaitu menerima, mengelola, dan bertanggung jawab dalam pengeluaran atas semua barang.

IV. Tata Usaha Teknik

Tugas pokoknya dalam melakukan pencatatan barang keluar dan perawatan barang.

V. Tata Usaha Gudang

Tugas pokoknya yaitu pelaksanaan pencatatan pembukuan, seperti pemasukan dan pengeluaran barang.